

PERAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA MENJADI PERDA (Studi di DPRD Kota Blitar)

Divi Agustina, Sjamsiar Sjamsuddin, Ainul Hayat

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: Ayasdivi@gmail.com

Abstract: *Role of Local Council Members in Submission dan Discussion of Local Regulation Draft (RAPERDA) into Local Regulation (PERDA) (Study in Blitar City Local Council).* Local Council members in carrying out its functions in the field of regulation granted the right to submit a RAPERDA into PERDA. Constitutional change must be able to drive productivity of Blitar City Local Council members to use their rights in the submission and discussion of RAPERDA into PERDA with people. The results of this study indicate that: (1) Local Council Members have a good role in both the submission and discussion of RAPERDA into PERDA, (2) In the implementation the mechanism of RAPERDA submission and discussion that proposed by local council members to be PERDA dominated by council members, and (3) Factors that influence members of Local Council in lawmaking in Blitar City, are: (a) The government has not Blitar Local Regulation Program yet, (b) Lack of budget funds provided by Blitar Government in submission dan discussion of proposed RAPERDA to be PERDA by local council members, (c) The ability of Local Council members who are less competent in submission and discussion of RAPERDA into PERDA, and (d) Agenda's of Local Council members that too much.

Keywords: *role of local council members, local regulation, Blitar City*

Abstrak: **Peran Anggota DPRD dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA menjadi PERDA (Studi di DPRD Kota Blitar).** Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi diberikan hak untuk mengajukan RAPERDA menjadi PERDA. Perubahan konstitusional tersebut seharusnya mampu mendorong produktivitas anggota DPRD Kota Blitar dalam menggunakan hak pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA yang pro rakyat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Anggota DPRD memiliki peran baik dalam pengajuan maupun pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, (2) Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA didominasi oleh anggota DPRD dan (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA di Kota Blitar antara lain: (a) Pemerintah Kota Blitar belum memiliki Program Legislasi Daerah, (b) Minimnya anggaran dana yang disediakan Pemerintah Kota Blitar dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA, (c) Kemampuan anggota DPRD yang kurang kompeten dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, dan (d) Agenda anggota DPRD yang padat.

Kata kunci: peran anggota DPRD, peraturan daerah, Kota Blitar

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengelola daerahnya harus disesuaikan dengan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan juga bahwa urusan daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.

Diantara sekian urusan wajib yang dimiliki pemerintah daerah salah satunya adalah membuat PERDA. Berdasarkan pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PERDA adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota". Tujuan dibentuknya PERDA adalah untuk menciptakan *kodifikasi* bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang

sudah mengendap di masyarakat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, sekaligus sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.

Berdasarkan pengertian PERDA di atas dapat diketahui bahwa, dalam pembuatannya PERDA dikerjakan oleh dua (2) pihak penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara daerah sekaligus menjadi mitra kerja dari Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Menurut Wasistiono (2009, h.76), proses fungsi legislasi yang dijalankan DPRD memiliki delapan tahapan yaitu dimulai dari penyusunan PROLEGDA, penyusunan RAPERDA, pengajuan RAPERDA, sosialisasi RAPERDA, pembahasan RAPERDA, pengesahan dan penetapan RAPERDA, pengundangan PERDA dan yang terakhir sosialisasi PERDA kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Universitas Gajah Mada pada tahun 2006, Kota Blitar tercatat sebagai daerah yang memperoleh ranking tertinggi se Indonesia untuk inisiasi dan konsistensi kebijakan yang mengarah pada *good governance* (Profil Kota Blitar Tahun 2010, h.24). Namun demikian, pada kenyataannya dilapangan dari 15 Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan Kota Blitar masa jabatan 2009 – 2014, hanya ada 3 saja PERDA yang berasal dari usulan anggota DPRD (DPRD Kota Blitar, 2013). Dari penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: yang pertama, Bagaimanakah peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar. Kedua, Bagaimanakah mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA di Kota Blitar. Ketiga, Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi anggota DPRD untuk mengajukan dan membahas RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar. Disamping itu juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA di Kota Blitar. Serta untuk mendeskripsikan dan

menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anggota DPRD untuk mengajukan dan membahas RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Pemerintahan Daerah

Administrasi Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga kata, yaitu administrasi, pemerintahan dan daerah. Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Selanjutnya, pemerintahan adalah proses, rangkaian kegiatan yang terorganisir, terencana, terarah, terkendali yang bersumber pada kedaulatan negara, yang meliputi *yurisdiksi territorial* dan *yurisdiksi personil* (Ibrahim, 1997, h.30). Sedangkan, daerah memiliki arti sebagai bagian dari lingkungan pemerintah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Administrasi Pemerintahan Daerah adalah suatu kegiatan dalam mengelola informasi, manusia dan harta benda secara terorganisir yang bersumber pada kedaulatan negara di lingkungan pemerintah. Pada hakekatnya, administrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu ruang lingkup dari administrasi publik karena administrasi pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara.

2. Pemerintahan Daerah

Menurut Satriya (2013, h.10), Pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintahan yang ada di daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif beserta perangkat daerah di bawahnya dan DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi yang diatur oleh perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah lokal dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dalam pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/atau Kota

dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Menurut De Guzman dan Taples (dalam Nurcholis, 2010, h.1.26–1.27), unsur – unsur pemerintahan daerah ada 5 (lima) yaitu: (a) Pemerintahan daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan bangsa/ negara, (b) Pemerintahan daerah diatur oleh hukum, (c) Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat setempat, (d) Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dan (e) Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan merujuk pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah memiliki hubungan dengan otonomi daerah dan juga dengan desentralisasi. Otonomi Daerah berhubungan dengan seberapa besar pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasinya. Sedangkan desentralisasi berhubungan dengan seberapa besar kewenangan administratif dan politik yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada satuan administrasi pemerintahan di bawahnya. Dengan demikian, maka hubungan yang terjadi antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat bersifat sub – ordinat dan *dependent*.

Selanjutnya menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam Muluk (2009, h.124), dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terdapat 3 dimensi yang berpengaruh. Ketiga dimensi tersebut adalah :

- a) Dimensi ekonomi.
- b) Dimensi pemerintahan.
- c) Dimensi politik.

Dengan mengacu pada ketiga dimensi di ataslah, model peran pemerintah daerah akan dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tahun semakin kompleks. Sehingga dalam proses penyelenggaraannya pemerintah pusat memberikan kewenangan berupa pemberian beberapa kekuasaan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya. Kekuasaan inilah yang disebut dengan desentralisasi.

3. Desentralisasi

Menurut Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah “Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Andi Mustari Pide (dalam Hendratno, 2009, h.65), desentralisasi

adalah sebuah pendekatan dan teknik manajemen yang berkenaan dengan pendelegasian wewenang tanggung jawab dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Dalam beberapa kepustakaan, desentralisasi dikenal memiliki 2 (dua) macam yakni: (a) desentralisasi jabatan dan (b) desentralisasi kenegaraan (Hendratno, 2009, h.64). Untuk kondisi seperti Indonesia, dimana geografisnya didominasi oleh laut dan karakteristik geografis antar provinsinya yang beragam, begitu juga dengan masyarakatnya, maka penerapan desentralisasi akan sangat memberikan manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain: (1) kebijakan – kebijakan publik yang diputuskan akan lebih cepat dan akurat karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi daerahnya sendiri, (2) pemerintah daerah didorong atau dipaksa untuk belajar bertanggung jawab akan masa depan rakyat di daerah masing–masing, (3) pemerintah daerah akan lebih mampu menggali potensi penerimaan daerah, (4) beban finansial dan nonfinansial pemerintah pusat akan berkurang, (5) pemerintah pusat dapat lebih mengonsentrasikan diri pada kebijakan–kebijakan publik nasional dan internasional, dan (6) bertambah besarnya dukungan politik rakyat (Tjiptoherijanto dan Manurung, 2010, h.184).

Terkait dengan nilai dasar dari desentralisasi, menurut Muluk (2009, h.64) Indonesia menganut nilai *structural efficiency model* dan *local democracy model*. Dimana model struktural efisiensi mengedepankan nilai–nilai utama efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Sedangkan model lokal demokrasi artinya pemerintah pusat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya disesuaikan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan serta potensi yang dimiliki daerah.

4. DPRD

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan daerah. Pasal 41 Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan sebagai lembaga perwakilan rakyat DPRD memiliki 3 peran/fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara umum tugas dan wewenang DPRD tercantum juga pada pasal 344 Undang–Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang–Undang tersebut utamanya pasal 350 dan 351 dicantumkan juga terkait hak dan kewajiban

yang dimiliki oleh anggota DPRD. Di antara hak tersebut anggota tersebut berhak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (RAPERDA). Selanjutnya terkait dengan alat kelengkapan yang harus dimiliki DPRD tercantum pada pasal 353. Adapun isi dari pasal tersebut adalah bahwa DPRD memiliki alat kelengkapan Di antaranya:

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah (BANMUS)
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi Daerah (BANLEGDA)
- e. Badan Anggaran (BANGGAR)
- f. Badan Kehormatan (BK), dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Selain alat kelengkapan juga diharuskan untuk membentuk fraksi sebagai bentuk pengelompokan anggota DPRD dari partai politik peserta pemilihan umum yang mendapatkan kursi di DPRD. Tujuan dari dibentuknya fraksi adalah untuk meningkatkan efisiensi para anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat sekaligus mempermudah dan memperlancar koordinasi kerja Di antara kelompok yang ada dalam DPRD itu sendiri.

5. Peraturan Daerah

Menurut Isra (2010, h.60), Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengurus otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya dilihat dari jenisnya PERDA dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

1. Kelompok Rutin, seperti pengesahan APBD, perubahan APBD, pengesahan perhitungan APBD.
2. Kelompok Insidental, meliputi semua peraturan daerah yang dibuat hanya sekali sesuai dengan kebutuhan (Wasistiono dan Riyani, 2001, h.21).

Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memuat asas-asas antara lain sebagai berikut: (a) Kejelasan tujuan, (b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, (c) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, (d) Dapat dilaksanakan, (e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, (f) Kejelasan

rumusan dan (g) Keterbukaan. Menurut Wasistiono dan Wiyoso (2009, h.77), setiap proses pembuatan/pembentukannya, PERDA harus mencakup beberapa tahapan, yakni mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan sebuah pilihan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Menurut Arikunto (2002, h.8), Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Secara umum penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ingin menggambarkan suatu keadaan secara apa adanya dan setepat mungkin. Dalam penelitian mengenai peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena sesuai dengan pendapat dari Sugiyono (2013, h.1), bahwa pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan dalam penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci untuk mendapatkan data atas permasalahan yang diangkat.

Sementara itu, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri dilakukan secara *triangulasi* (gabungan) artinya adanya penggabungan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh bisa benar – benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis datanya bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan pada makna daripada *generalisasi*. Artinya, secara prinsip dalam pendekatan kualitatif ini pengumpulan data tidak dipandu oleh teori melainkan dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilakukan. Sehubungan dengan penelitian tentang Peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, maka peneliti memberi batas fokus berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.
 - a. Peran anggota DPRD dalam pengajuan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.
 - b. Peran anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar.

2. Mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.
 - a. Mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.
 - b. Mekanisme pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar.
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi anggota DPRD Kota Blitar untuk mengajukan dan membahas RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, meliputi: Program Legislasi Daerah (PROLEGDA), Anggaran Dana, Kemampuan anggota DPRD dan Agenda anggota DPRD.

Lokasi penelitian di Kota Blitar dan situs penelitian pada Kantor DPRD Kota Blitar. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, metode pencatatan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Model Interaktif dari Miles dan Hubberman yang diterjemahkan dalam Sugiyono (2013, h.96). Analisis model interaktif ini melalui 4 tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Dalam penyusunan produk hukum yang berbentuk peraturan perundang–undangan diperlukan adanya suatu standar, baik bentuk luar (kerangkanya) atau sistematika maupun tata penulisan dan perumusan normanya. PERDA merupakan produk hukum daerah yang didasarkan pada permasalahan yang berasal dari aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Penelitian ini mengkhususkan pada peran anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar, dimana hal tersebut berkaitan dengan tujuan dibentuknya DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara kegiatan pemerintahan di daerah. Selain itu, hal tersebut juga berkaitan dengan peran dan kegiatan dari administrasi publik, karena salah satu dari kegiatan administrasi publik adalah memformulasikan kebijakan publik. Kegiatan memformulasikan kebijakan publik melalui DPRD kota Blitar sesuai dengan manfaat dari diadakannya desentralisasi.

Dimana menurut Tjiptoherijanto (2010, h.184), salah satu manfaat dari diadakannya desentralisasi adalah kebijakan publik yang diputuskan akan lebih cepat dan akurat karena pemerintah daerah lebih memahami daerahnya

sendiri. Sehingga dalam hal ini DPRD Kota Blitar sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di kota Blitar harus mampu mengatur cara untuk mengorganisir dan menginterpretasikan aspirasi dari masyarakat ke dalam bentuk PERDA. Berikut adalah pembahasan yang peneliti lakukan:

1. Peran anggota DPRD dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar

Menurut Undang–Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang–undangan, sebuah rancangan peraturan daerah dapat berasal dari pihak eksekutif dalam hal ini gubernur, bupati/walikota maupun berasal dari pihak legislatif dalam hal ini DPRD. Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa anggota DPRD memiliki peran untuk melakukan pengajuan RAPERDA menjadi PERDA. Dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA ini anggota DPRD didukung dengan Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang–Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam kedua Undang–undang tersebut, disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki hak untuk melakukan pengajuan sekaligus pembahasan RAPERDA menjadi PERDA.

Dalam melakukan pengajuan RAPERDA menjadi PERDA harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau yang disebut dengan naskah akademik. Selain itu juga harus disertakan nama dari pengusul, tandatangan pengusul dan juga Nomor Pokok yang diperoleh dari Sekretariat DPRD. Selanjutnya dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA peran anggota DPRD dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan sumber dari RAPERDA itu sendiri. Pertama, apabila RAPERDA berasal dari Walikota maka anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA menjadi PERDA adalah sebagai pembahas yang akan memberikan pandangan umum termasuk kritikan, saran dan pertanyaan dari RAPERDA yang sedang dibahas. Kedua, apabila RAPERDA yang sedang dibahas berasal dari anggota DPRD, maka anggota DPRD akan berperan sebagai pemberi penjelasan kepada Walikota terkait dari isi RAPERDA yang diajukan kepada Walikota.

2. Mekanisme Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA di Kota Blitar

Sesuai dengan Undang–Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, proses penyusunan peraturan daerah itu terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan. Adapun mekanisme pengajuan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA ini terdapat pada tahapan kedua, yakni tahapan penyusunan. Pada tahapan ini mekanisme pengajuan RAPERDA diawali dengan adanya penyerahan naskah akademik dari para pengusul yang disertai nama pengusul, tandatangan pengusul dan juga Nomor Pokok yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada pimpinan DPRD secara tertulis. Setelah pimpinan DPRD menerima semua berkas tersebut, pimpinan DPRD akan menugaskan kepada Badan Legislasi Daerah untuk melakukan pengkajian terhadap RAPERDA yang diajukan para pengusul. Selesai badan legislasi melakukan pengkajian, RAPERDA akan dikembalikan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya pimpinan DPRD akan mengadakan rapat paripurna internal untuk meminta pendapat dari anggota DPRD yang lain terkait RAPERDA yang diajukan para pengusul, apakah RAPERDA yang diusulkan tersebut bisa dijadikan sebagai RAPERDA Prakarsa dari DPRD atau tidak.

Adapun mekanismenya dalam pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA diawali dengan pengiriman surat oleh pimpinan DPRD kepada Walikota. Dalam pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA ini dibagi menjadi 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pertama, pembicaraan pembahasan akan diliputi dengan adanya penjelasan dari pengusul RAPERDA dalam hal ini DPRD mengenai RAPERDA yang diajukan. Selanjutnya akan diberikan waktu kepada Walikota untuk memberikan tanggapan dan/pendapat terkait RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD. Pada pembicaraan tahap pertama ini akan ditutup dengan adanya tanggapan dari anggota DPRD terkait pendapat yang diberikan Walikota. Kedua, dalam pembicaraan pembahasan tingkat 2 (dua) rapat akan berisi tentang pengambilan keputusan dari hasil pembicaraan tingkat pertama. Kemudian pimpinan rapat paripurna akan meminta persetujuan secara lisan kepada anggota dan diakhiri dengan pendapat dari Walikota. Apabila dari pembicaraan tingkat 2 (dua) ini diperoleh hasil bahwa RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD disetujui menjadi PERDA maka RAPERDA tersebut akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan peraturan undang-undang yang berlaku yaitu tahapan pengesahan dan/atau pengundangan untuk dijadikan sebagai PERDA atau produk

hukum daerah. Sebaliknya jika RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD tidak memperoleh persetujuan dari Walikota maka RAPERDA tersebut akan berhenti disitu dan tidak boleh diusulkan lagi dalam masa sidang yang sama.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di DPRD Kota Blitar menyatakan bahwa mekanisme yang dijalankan anggota DPRD dalam melakukan pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA kurang sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Hal ini dikarenakan setelah mencapai persetujuan antara anggota DPRD dengan Walikota, RAPERDA yang seharusnya menurut peraturan bisa langsung disahkan dan diundangkan menjadi PERDA harus dikirim terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi dan direvisi. Dari fenomena yang seperti inilah, menyebabkan kearifan lokal akan mati. Hal ini dikarenakan meskipun negara Indonesia ini menjunjung tinggi yang namanya demokrasi, namun pada realitanya hal tersebut tidak terwujud nyata. Karena dalam sistem demokrasi negara atau pemerintah pusat seharusnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi atau kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah, termasuk disini kewenangan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang muncul dalam masyarakat di daerah tersebut.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota DPRD untuk mengajukan dan membahas RAPERDA menjadi PERDA

Dalam menjalankan setiap peran pasti akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi, begitu juga dengan anggota DPRD dalam menjalankan perannya dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA khususnya di Kota Blitar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA di Kota Blitar ada 4 (empat), yaitu (a) Sampai saat ini pemerintah Kota Blitar belum memiliki Program Legislasi Daerah, (b) Minimnya anggaran dana yang disediakan Pemerintah Kota Blitar dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA, (c) Kemampuan anggota DPRD yang kurang kompeten dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, dan (d) Agenda anggota DPRD yang padat

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Anggota DPRD memiliki peran baik dalam pengajuan maupun pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, (2) Dalam pelaksanaannya mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA didominasi oleh anggota DPRD dan (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA di Kota Blitar antara lain: (a) Sampai

saat ini pemerintah Kota Blitar belum memiliki Program Legislasi Daerah, (b) Minimnya anggaran dana yang disediakan Pemerintah Kota Blitar dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA, (c) Kemampuan anggota DPRD yang kurang kompeten dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, dan (d) Agenda anggota DPRD yang padat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2002) **Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek**. Jakarta: Rineka Cipta
- DPRD Kota Blitar. (2013) **Produk Hukum DPRD Kota Blitar Periode 2009-2014**. diakses pada 13 September 2013 melalui www.blitarkota.go.id.
- Hendratno, Edie Toet. (2009) **Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme**. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ibrahim, Jimmi Mohamad. (1997) **Prospek Otonomi Daerah**. Semarang : Dahara Prize.
- Isra, Saldi. (2010) **Pergeseran Fungsi Legislasi**. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muluk, Khairul. (2009) **Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah**. Surabaya : ITS Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) **Definisi Daerah**. Diakses pada 14 November 2013 melalui www.KamusBahasaIndonesia.org.
- Nurcholis, Hanif, dkk. (2010) **Administrasi Pemerintahan Daerah**. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang- Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang–Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang–undangan. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Profil Kota Blitar. 2013. Blitar. Pemerintah Kota Blitar
- Satriya, Dymas Bangkit. (2013) **Pengembangan Sumberdaya Aparatur untuk Meningkatkan Kinerja Studi di Kantor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang**. Malang : FIA Publik Universitas Brawijaya
- Sugiyono. (2013) **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta.
- Tjiptoherijanto, Prijono & Manurung, Mandala. (2010) **Paradigma Administrasi Publik Dan Perkembangannya**. Jakarta : UI Press.
- Wasistiono, Sadu & Riyani, Ondo. (2001) **Prosiding Seminar Nasional Etika Hubungan Legislatif – Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah**. Bandung : Alqaprint.
- Wasistiono, Sadu & Wiyoso, Yonatan. (2009) **Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**. Bandung : Fokusmedia.